

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN "MERDEKA BELAJAR, KAMPUS MERDEKA" BAGI MAHASISWA DI DAERAH PERBATASAN

**BELLA GHIA DIMMERA^{1*)}, WINDA LIDIA LUMBANTOBING²⁾,
PEBRIA DHENI PURNASARI³⁾, YOSUA DAMAS SADEWO⁴⁾, TOTOK VICTOR DIDIK SAPUTRO⁵⁾**

^{1,2,3,4,5}Institut Shanti Bhuana, Bengkayang

email: bellaghia@shantibhuana.ac.id¹⁾, winda.tobing@shantibhuana.ac.id²⁾,

pebria.dheni@shantibhuana.ac.id³⁾, yosua.damas@shantibhuana.ac.id⁴⁾,

totok.victor@shantibhuana.ac.id⁵⁾

*) Korespondensi: bellaghia@shantibhuana.ac.id

Naskah diterima: 17 April 2023 - disetujui: 10 Juni 2023

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan "Merdeka Belajar, Kampus Merdeka" (MBKM) bagi Mahasiswa di Daerah Perbatasan. Permasalahan yang ada di daerah perbatasan dianalisis melalui studi kasus kualitatif deskriptif. Sumber data utama untuk penelitian ini diperoleh melalui survei dan wawancara. Kuesioner dan petunjuk untuk survei diberikan kepada responden, yaitu mahasiswa. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi; triangulasi untuk memastikan keabsahan data; dan data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sasaran kebijakan MBKM bagi 36 mahasiswa adalah efektivitas kebijakan MBKM di daerah perbatasan dinilai belum sepenuhnya tepat. Diperoleh hasil yaitu belum tepat kebijakan, belum tepat dalam pelaksanaan, belum tepat target, dan belum tepat lingkungan. Dengan adanya kebijakan MBKM, mahasiswa belum menerima dan memahami manfaatnya, yakni kebijakan MBKM sudah disosialisasikan namun mahasiswa belum memahaminya dengan baik, belum tepat pelaksanaan, bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan MBKM, namun belum sesuai dengan kondisi perguruan tinggi di daerah perbatasan. Belum tepat target, bahwa pemerataan pendidikan belum mencapai target. Belum tepat lingkungan, bahwa kebijakan MBKM belum memberikan informasi terkait pembangunan pendidikan di daerah perbatasan. Belum tepat proses, bahwa pemahaman publik dan tanggapan publik mengenai kebijakan MBKM di daerah perbatasan masih belum siap.

Kata kunci: efektivitas; kebijakan MBKM; daerah perbatasan

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effectiveness of the "Merdeka Belajar, Kampus Merdeka" (MBKM) policy for students in border areas. The problems that exist in border areas are analyzed through descriptive qualitative case studies. The main data sources for this research were obtained through surveys and interviews. Questionnaires and instructions for surveys were given to respondents, namely students. Data were collected through interviews and documentation; triangulation to ensure data validity; and data were analyzed through reduction, presentation, and conclusion drawing. The results of the study revealed that the target of the MBKM policy for 36 students is the effectiveness of the MBKM policy in border areas is considered not entirely appropriate. The results obtained are not the right policy, not the right implementation, not the right target, and not the right environment. With the existence of the MBKM policy, students have not received and understood the benefits, namely the MBKM policy has been socialized but students have not understood it well, not yet appropriate implementation, that the government has established the MBKM policy, but it is not in accordance with the conditions of universities in border areas. Not yet on target, that education equity has not yet reached the target. Not yet appropriate environment, that the MBKM policy has not provided information related to educational development in border areas. The public's understanding and response regarding the MBKM policy in Border Areas are still not ready, thus the process is not yet appropriate.

Keywords: effectiveness; MBKM Policy; border area

PENDAHULUAN

Pendidikan sangat penting untuk mengukur keberhasilan suatu bangsa, dan kemajuan suatu bangsa bergantung pada kesiapan pendidikannya. Pendidikan adalah permata kehidupan yang dianggap sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan bangsa untuk menghadapi perkembangan zaman. Pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan manusia agar menjadi bangsa yang maju dan besar (Inanna, 2018). Masyarakat Indonesia saat ini harus mengimbangi kemajuan teknologi yang berkembang pesat, karena masalah pendidikan menjadi topik diskusi dan keprihatinan bersama. Kebijakan pendidikan Indonesia terus berubah untuk memenuhi kebutuhan zaman. Salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, "Merdeka Belajar, Kampus Merdeka" (MBKM), menunjukkan fenomena tersebut.

Kebijakan MBKM adalah kebijakan kurikulum yang dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, kehidupan profesional, dan perkembangan teknologi yang cepat. Kebijakan MBKM ini mulai diluncurkan pada tahun 2020. Kebijakan mengenai MBKM tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Kemendikbud, 2020), pada Pasal 18 dijelaskan bahwa:

Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana

atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Oleh karena itu, fokus utama kebijakan MBKM ini adalah mempersiapkan keterampilan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan zaman. Diharapkan melalui MBKM ini mahasiswa akan memiliki kemampuan untuk bersaing di dunia pendidikan.

Pemerintah, sebagai entitas publik yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan menyediakan pendidikan, bertanggung jawab atas keberhasilan tujuan kebijakan MBKM ini. Di sisi lain, masyarakat juga perlu mengakui peran mereka sebagai pengguna layanan pendidikan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, diperlukan keseimbangan antara tujuan dan pencapaian. Penerapan kebijakan MBKM adalah salah satu tujuan pemerintah saat ini. Namun, Kebijakan MBKM ini tentunya memiliki banyak tantangan dan hambatan untuk diterapkan. Pemahaman mahasiswa tentang kebijakan MBKM sangat penting untuk keberhasilan program. Hal ini karena pemerintah seharusnya membuat kebijakan tersebut agar mahasiswa dapat bersaing di dunia kerja setelah lulus.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dipandang perlu dilakukan kajian untuk mengetahui efektivitas kebijakan MBKM khususnya di perguruan tinggi swasta yang berada di daerah perbatasan, mengingat keadaan daerah perbatasan didominasi oleh ketimpangan dan infrastruktur pendidikan yang kurang memadai. Wilayah perbatasan yang dimaksud adalah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia (Purnasari, 2021). Memiliki luas 5.396,3 km², Kabupaten Bengkayang merupakan kabupaten terkecil di Kalimantan Barat dan memiliki letak geografis yang strategis karena berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia di bagian utara. Ini merupakan 3,68 persen dari total luas Kalimantan Barat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana kebijakan MBKM berguna bagi mahasiswa di daerah perbatasan, khususnya pada perguruan tinggi swasta di daerah perbatasan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan MBKM yang lebih baik dapat diterapkan serta dapat menjawab tantangan pendidikan tinggi dengan menghasilkan lulusan yang berkualitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti melihat perubahan perilaku dikaitkan dengan tindakan dari berbagai kelompok orang. Pendekatan kualitatif sebagai

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang dan perilaku yang dapat diamati dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat terjun langsung untuk mengadakan wawancara dengan responden, observasi, bahkan turut serta dalam proses, sehingga dapat mengetahui secara mendalam mengenai substansi yang diteliti (Rukajat, 2018).

Penelitian ini menggunakan studi kasus deskriptif untuk menganalisis permasalahan di lapangan. Metode deskriptif analisis adalah metode penelitian yang menciptakan gambaran suatu keadaan atau peristiwa, suatu fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan keadaan saat ini. Metode deskriptif berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sebagaimana adanya. Sedangkan, metode studi kasus adalah uraian dan penjelasan yang komprehensif tentang berbagai aspek individu, kelompok, organisasi (masyarakat), program atau situasi sosial (Fitrah, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan di Institut Shanti Bhuana dan Akmen Bumi Sebalu, Kabupaten Bengkayang dikarenakan secara geografis, Institut Shanti Bhuana berada di Kabupaten Bengkayang dan berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga wilayah tersebut dikategorikan sebagai wilayah perbatasan.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini

diperoleh melalui survei dan wawancara dengan menggunakan kuesioner dan petunjuk survei kepada responden yaitu mahasiswa. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka yang terdiri dari jurnal, laporan ilmiah, laporan resmi pemerintah dan bahan lain yang relevan.

Ada tiga metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Wawancara secara mendalam: dilakukan dengan cara menggali informasi secara mendalam dari para responden. (2) Penelitian dokumenter: dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dan sumber informasi yang terpercaya. (3) Observasi: dilaksanakan dengan membuka informasi kepada mahasiswa di wilayah perbatasan tentang efektifitas kebijakan MBKM.

Pengukuran efektifitas kebijakan MBKM bagi mahasiswa di Daerah Perbatasan menggunakan indikator "lima tepat" yaitu Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksanaan, Tepat Target, Tepat Lingkungan, Tepat Proses (Nugroho, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kebijakan MBKM merupakan Kebijakan Mendikbud bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk memperoleh berbagai pengetahuan yang akan berguna di dunia kerja. Kebijakan ini menawarkan mahasiswa berkesempatan untuk memilih program studi yang ingin mereka pelajari.

Selain itu, dalam implementasinya mahasiswa diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan di luar kelas selama tiga semester dalam kurikulum. Pada dasarnya, konsep ini membuat mahasiswa lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan di luar kelas.

Kebijakan MBKM dinilai efektif apabila MBKM tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari adanya kebijakan MBKM itu sendiri. Kebijakan MBKM ada untuk mewujudkan pembangunan pendidikan nasional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Efektivitas Kebijakan MBKM bagi Mahasiswa di Daerah Perbatasan, ditemukan beberapa informasi yang mampu menjelaskan bagaimana efektifitas kebijakan MBKM bagi mahasiswa khususnya pada perguruan tinggi swasta di Kabupaten Bengkayang. Untuk mengukur efektifitas dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada dimensi efektifitas kebijakan yang meliputi tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, dan tepat lingkungan, dan tepat proses yang diterangkan oleh (Nugroho, 2021).

Keefektifan implementasi kebijakan MBKM bagi Mahasiswa di daerah perbatasan, yaitu: 1) Ketepatan kebijakan MBKM bagi mahasiswa di daerah perbatasan yang ada sudah belum dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan; 2) Kebijakan MBKM ini tujuannya adalah untuk lebih mengarahkan aktivitas mahasiswa namun kenyataannya

belum sepenuhnya dilaksanakan oleh mahasiswa di daerah perbatasan; 3) Target sasaran kebijakan MBKM ini belum diintervensi, program belum efektif dalam mencapai target sarannya; 4) Tepat Lingkungan mencakup kebijakan MBKM bagi mahasiswa di daerah perbatasan belum sepenuhnya dijalankan secara internal dan eksternal; 5) Kebijakan MBKM ini belum menunjukkan pemahaman publik, reaksi publik, dan pelaksanaan bagi mahasiswa di daerah perbatasan.

Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup Kebijakan MBKM di wilayah Bengkayang, jadi respondennya dipilih berdasarkan kebutuhan peneliti tentang sumber data mengenai efektivitas penerapan Kebijakan MBKM bagi Mahasiswa di daerah perbatasan. Berikut penjelasan hasil dan diskusi penelitian ini.

1. Tepat Kebijakan MBKM bagi Mahasiswa di Daerah Perbatasan

Program MBKM untuk mahasiswa, meliputi: pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi mandiri/ proyek, pengembangan desa/kuliah kerja nyata tematik (Tohir, 2020). Kebijakan ini dapat memfasilitasi perguruan tinggi membuka dan mengakreditasi program studi baru. Namun, penerapan kebijakan tersebut

belum dapat menyelesaikan masalah mahasiswa. Dalam implementasi kebijakan tersebut belum dapat menyelesaikan permasalahan mahasiswa. Oleh karena itu, ditetapkannya kebijakan pemerintah terkait MBKM diukur dari ketepatan kebijakan tersebut, sehingga MBKM merupakan kebijakan yang belum tepat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa bentuk kegiatan belajar yang belum bisa dilakukan di Institut Shanti Bhuana maupun Akademi Manajemen Sebalo, seperti (1) pertukaran pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, serta pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda; (2) program magang 1-2 semester; (3) kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas, (4) penelitian di Lembaga riset/pusat studi. (5) proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya di dalam dan luar negeri; (6) kegiatan proyek independent yang dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan; (7) menjalankan program KKN, dengan Satuan Kredit Semesternya (SKS) dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS.

Mekanisme pertukaran pelajar dan kegiatan wirausaha belum optimal dilaksanakan. Pertukaran pelajar baru dapat dilakukan antar program studi pada

perguruan tinggi yang sama mulai pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023. Sedangkan, pada salah satu perguruan tinggi di daerah perbatasan tersebut hanya memiliki satu program studi sehingga tidak dapat melakukan pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Mahasiswa pada kedua perguruan tinggi menyetujui bentuk kegiatan pembelajaran yang ditawarkan oleh kampus, namun belum memahami mekanismenya dengan baik. Salah satu tujuan bentuk kegiatan pertukaran pelajar yaitu penyelenggaraan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi perbedaan pendidikan antara perguruan tinggi dalam negeri serta persyaratan pendidikan tinggi dalam dan luar negeri. Begitu juga dengan kegiatan wirausaha, Kebijakan MBKM memberi mahasiswa kesempatan untuk berwirausaha. Adapun konsep Kebijakan MBKM ini sudah sangat bagus, meskipun dalam implementasi sangatlah tidak mudah dilakukan untuk saat ini khususnya pada perguruan tinggi di daerah perbatasan. Akan tetapi, jika setiap perguruan tinggi bersinergi melakukan kerjasama tanpa memandang kelebihan dan kekurangan masing-masing perguruan tinggi, maka tujuan MBKM dapat terwujud. Mahasiswa juga dapat termotivasi untuk mengembangkan keterampilan wirausaha melalui program kegiatan pembelajaran yang tepat. Terlaksananya pertukaran pelajar dan kegiatan wirausaha menunjukkan bahwa sudah ada upaya dari perguruan tinggi di daerah perbatasan

untuk mengimplementasikan kebijakan MBKM. Hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman dan konteks keilmuan dalam proses belajar mengajar siswa yang diperoleh dari perguruan tinggi lain, yang memiliki alat atau fungsi penunjang belajar yang diperlukan untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa dan meningkatkan minat wirausaha mereka (Arjanto, 2022). Untuk mengoptimisasi perwujudan delapan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM, perlu adanya sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa sehingga mahasiswa dapat menerima dan memahami manfaat kebijakan MBKM.

2. Tepat Pelaksanaan Kebijakan MBKM bagi Mahasiswa di Daerah Perbatasan
Ketepatan pelaksanaan MBKM bagi mahasiswa di daerah perbatasan dapat ditunjukkan dengan adanya kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Pelaksana MBKM dalam hal ini bukan hanya pemerintah, namun ketepatan pelaksanaan dari keterlibatan ketiga pihak tersebut. Tujuan MBKM ini adalah untuk mewujudkan pembangunan pendidikan nasional. Namun, perlu adanya pengembangan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan tersebut terutama kondisi pendidikan di daerah perbatasan, karena salah satu dimensi yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dunia pendidikan nasional ke depan adalah pemerataan pendidikan. Berangkat dari pelaksanaan kebijakan MBKM ke

depannya harus direncanakan dan disempurnakan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Mengingat pentingnya MBKM, mempersiapkan lulusan menghadapi dunia kerja, maka kebijakan MBKM diharapkan dapat memecahkan masalah atau mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan di daerah perbatasan. Kurikulum juga dapat menjadi alat bantu untuk mencapai tujuan dan sebagai pedoman pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan (Ritonga, 2018). Oleh karena itu, implementasi MBKM ini juga memerlukan pemantauan terus menerus sehingga tujuan yang diharapkan dapat terwujud.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa pada kedua perguruan tinggi di daerah perbatasan mengenai MBKM masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya mahasiswa yang belum memahami prosedur pelaksanaan teknis MBKM, sehingga dampak positif dari MBKM tersebut belum terlihat. Dampak implementasi MBKM adalah efektivitas yang tinggi, yaitu terkait dengan peningkatan *hard skill* dan *soft skill* mahasiswa yang melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM, begitu pula sebaliknya (Marasabessy, 2022).

3. Tepat Target Kebijakan MBKM bagi Mahasiswa di Daerah Perbatasan
Ketepatan target kebijakan MBKM adalah kebijakan yang direncanakan

pemerintah untuk dapat dicapai. Perbandingannya mencakup dua hal, yaitu apakah target MBKM sudah direncanakan berdasarkan kesiapan semua pihak, serta apakah setelah kebijakan MBKM ini ditetapkan, mendapatkan konflik atau memperoleh kurikulum yang dianggap ideal. Pertama, apakah target MBKM sudah direncanakan berdasarkan kesiapan semua pihak. Kesiapan diukur dengan mempertimbangkan kebutuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana perguruan tinggi masing-masing, serta pemahaman sumber daya manusia yang terlibat untuk menerapkan MBKM. Implementasi kebijakan MBKM menghadapi banyak tantangan bagi kedua perguruan tinggi di daerah perbatasan. Adanya kebijakan baru, menjadikan mahasiswa harus menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kebijakan baru yang ditetapkan oleh penegak kebijakan. Beradaptasi dengan kebijakan baru adalah tantangan besa, karena sulit untuk mengubah budaya belajar mahasiswa saat ini. Budaya yang ditargetkan harus berdasarkan Kebijakan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang membahas Standar Nasional Pendidikan tinggi dengan menyorot kebijakan terkait MBKM (Kemendikbud, 2020). Namun, hal itu menunjukkan hasil yang positif selama kebijakan MBKM ditetapkan. Berdasarkan hasil diperoleh peneliti, hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa mendukung pelaksanaan MBKM. Dalam perencanaan maupun pelaksanaannya,

dengan adanya dukungan institusi, Program Studi dan dosen pembimbing akademik bagi mahasiswa sehingga penerapan MBKM dapat dilakukan secara efektif.

Ketepatan target kedua, apakah setelah kebijakan MBKM ini ditetapkan, mendapatkan konflik atau memperoleh kurikulum yang dianggap ideal. Dapat diketahui bahwa kebijakan MBKM ini dapat mewujudkan pemerataan pendidikan, karena ada beberapa alasan adanya proses MBKM, salah satunya adalah persyaratan dunia usaha dan industri. Kedua perguruan tinggi selalu berupaya untuk mendorong proses pembelajaran pendidikan tinggi sesuai kebijakan MBKM agar lebih mandiri dan fleksibel, serta menciptakan budaya belajar yang inovatif, tidak terbatas, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Pada kedua perguruan tinggi tersebut, pembangunan infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan untuk membantu dan memperlancar proses pembelajaran. MBKM dinilai efektif jika disertai dengan pemerataan infrastruktur pendidikan untuk mendukung pemerataan mutu pendidikan. Namun, dalam hal ini MBKM yang ditargetkan belum menyesuaikan dengan kondisi setempat. Oleh karena itu, praktik pendidikan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh agar perguruan tinggi di daerah perbatasan tidak ketinggalan. Dengan mengimplementasikan MBKM diharapkan dapat menciptakan lulusan yang siap memenuhi permintaan

kebutuhan dari Dunia Usaha dan Dunia Industri serta dapat menjadi agen perubahan.

4. Tepat Lingkungan Kebijakan MBKM bagi Mahasiswa di Daerah Perbatasan

Ketepatan lingkungan dapat diukur melalui lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan (Irmansyah, 2021). Ketepatan lingkungan kebijakan internal yaitu interaksi yang baik antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Interaksi tersebut sangatlah penting, karena keberhasilan MBKM ditentukan oleh keberhasilan dalam pembangunan pendidikan dengan setiap komponennya. Partisipasi ketiga pihak tersebut, dalam pendidikan sangat berpengaruh terhadap pembelajaran. Namun, masih ada kekhawatiran terhadap efektifitas pembelajaran mahasiswa. Sosialisasi yang dilakukan seharusnya berupa komunikasi dua arah tatap muka dan melakukan bimbingan teknis sebagai sarana komunikasi serta sebagai stimulus untuk mendapatkan informasi. Pengetahuan tersebut sangat penting bagi kedua perguruan tinggi di daerah perbatasan sebagai lembaga pendidikan untuk merencanakan program rutin yang mempertemukan mereka untuk membahas pencapaian MBKM bagi mahasiswa.

Ketepatan lingkungan eksternal kebijakan, pada dasarnya keadaan dan situasi penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan. Kondisi pendidikan di

daerah perbatasan masih dihadapkan dengan berbagai tantangan dan keterbatasan (Agung, 2012). Dalam kondisi seperti itu, sulit untuk membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang cukup berkualitas di wilayah perbatasan. Mahasiswa menyambut baik dan mendukung adanya kebijakan MBKM ini, karena dengan adanya kebijakan MBKM ini, menimbulkan harapan bagi pembentukan dan pengembangan kualitas mahasiswa di daerah perbatasan. Akan tetapi, ketepatan lingkungan MBKM dinilai belum sepenuhnya tepat, ditunjukkan dari penelitian dan penjelasan di atas bahwa lingkungan kebijakan internal dan lingkungan eksternal kebijakan meliputi interaksi dengan pemerintah perguruan tinggi, dan masyarakat serta daya saing mahasiswa di daerah perbatasan.

5. Tepat Proses Kebijakan MBKM bagi Mahasiswa di Daerah Perbatasan

Ketepatan proses pelaksanaan Kebijakan MBKM bagi Mahasiswa di Daerah Perbatasan tidak efektif karena publik belum memahami benar substansi program dan manfaatnya bagi masyarakat umum. Publik yang belum memahami secara benar program tersebut cenderung belum menerimanya.

Menurut Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum Institut Shanti Bhuana, tidak semua mahasiswa tertarik dengan kebijakan MBKM. Ini menunjukkan bahwa masyarakat umum belum memahami dan belum siap untuk melaksanakan atau

menjadi bagian dari program MBKM. Oleh karena itu, program MBKM di Daerah Perbatasan belum efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa belum tepat kebijakan, belum tepat pelaksanaan, belum tepat target, belum tepat lingkungan, dan belum tepat proses. Efektivitas kebijakan MBKM bagi mahasiswa di daerah perbatasan, dilihat dari dimensi efektivitas, diperoleh hasil bahwa mahasiswa belum menerima dan memahami manfaatnya, yakni kebijakan MBKM sudah disosialisasikan namun mahasiswa belum memahaminya dengan baik, belum tepat pelaksanaan, bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan MBKM, namun belum sesuai dengan kondisi perguruan tinggi di daerah perbatasan. Belum tepat target, bahwa pemerataan pendidikan belum mencapai target. Belum tepat lingkungan, bahwa kebijakan MBKM belum memberikan informasi terkait pembangunan pendidikan di daerah perbatasan. Belum tepat proses, bahwa pemahaman publik dan tanggapan publik mengenai kebijakan MBKM di daerah perbatasan masih belum siap.

Saran yang dapat diberikan yaitu perlunya sosialisasi kepada mahasiswa agar mahasiswa lebih paham tentang kebijakan MBKM, karena MBKM merupakan salah satu upaya kita untuk pembangunan pendidikan nasional. Sebelum menerapkan kebijakan MBKM, pemerintah

secara terus menerus melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai pelaksanaan MBKM, ada baiknya terjun langsung ke lapangan melihat secara keseluruhan pendidikan di daerah perbatasan agar pembangunan pendidikan nasional dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. (2012). Kajian penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan. *Jurnal Ilmiah Visi*, 7(2), 173-184.
- Arjanto, P. A. (2022). Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 5(3), 247-257.
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Inanna, I. (2018). Peran Pendidikan Dalam Membangun Karakter Bangsa Yang Bermoral. *JEKPEND" Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 1(1), 27-33.
- Kemendikbud, R. I. (2020). *Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kepala Biro Hukum Kemendikbud RI.
- Maghfiroh, N. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dalam Menghadapi Era Disrupsi Dan Era Society 5.0. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 9(05): 1185 -1196.
- Marasabessy, R. S. (2022). Kesiapan Dan Efektifitas Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Universitas Darussalam Ambon. *IKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan*, 6(2), 346-352.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Perbandingan, Praktik, dan Ideal*. Elex Media Komputindo.
- Purnasari, P. D. (2021). Strategi Pembelajaran Pendidikan Dasar di Perbatasan Pada Era Digital. *Jurnal Basicedu*, 5(5), 3089-3100.
- Purwaningwulan, M. M. (2022). *Implikasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dalam Meningkatkan Potensi dan Pengembangan Diri Mahasiswa*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Ritonga, M. (2018). Politik dan Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Hingga Masa Reformasi. *Bina Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 88-102.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tohir, M. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta.